BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Masalah kemiskinan ini bukannya semakin berkurang, tetapi justru semakin bertambah jumlah nya. Pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia semakin lama semakin menurun jumlahnya. Menurunnya jumlah pendapatan per kapita ini bukan saja merugikan negara, tetapi masyarakat pun secara tidak langsung akan merasakan dampak dari penurunan pendapatan per kapita tersebut. Kemiskinan pun akhirnya menjadi sebuah topik dan perhatian utama, bukan hanya bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di Indonesia saja, tetapi masyarakat di seluruh belahan dunia pun memperhatikan tentang masalah kemiskinan ini. Masyarakat di dunia akan meneliti apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia bukannya semakin berkurang justru semakin bertambah banyak. Bukan hanya itu saja, mereka juga pasti akan meneliti apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sudah mengakar tersebut. Hal ini menarik karena Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masyarakatnya justru dekat dengan angka kemiskinan, dan itupun yang akhirnya membuat Indonesia menempati salah satu negara miskin di dunia. Kita sebagai bangsa Indonesia merasa bingung dengan hal tersebut, apakah kita harus prihatin dengan hal tersebut atau justru sebaliknya, kita bangga dengan

pencapaian tersebut. Prestasi itupun membuahkan hasil dengan adanya penghargaan berupa aliran dana segar dan semakin memantapkan posisinya dalam daftar negara penghutang. Sungguh ironis, namun itulah yang terjadi. Fenomena kemiskinan ini akan semakin tampak nyata dan bentuk pengorbanannya berupa ratapan tangisan anak bangsa dan peluh para buruh yang terkapar.

Masalah kemiskinan merupakan masalah nasional, Karena masalah ini merupakan sumber muncul dan berkembangnya masalah sosial lainnya seperti anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, keluarga berumah tak layak huni, tuna susila, dan sebagainya. Karena itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Negara Indonesia

subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun rakyatnya yang tergolong miskin cukup besar. Usaha Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah serius, bahkan program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang rencanakan oleh pemerintah.

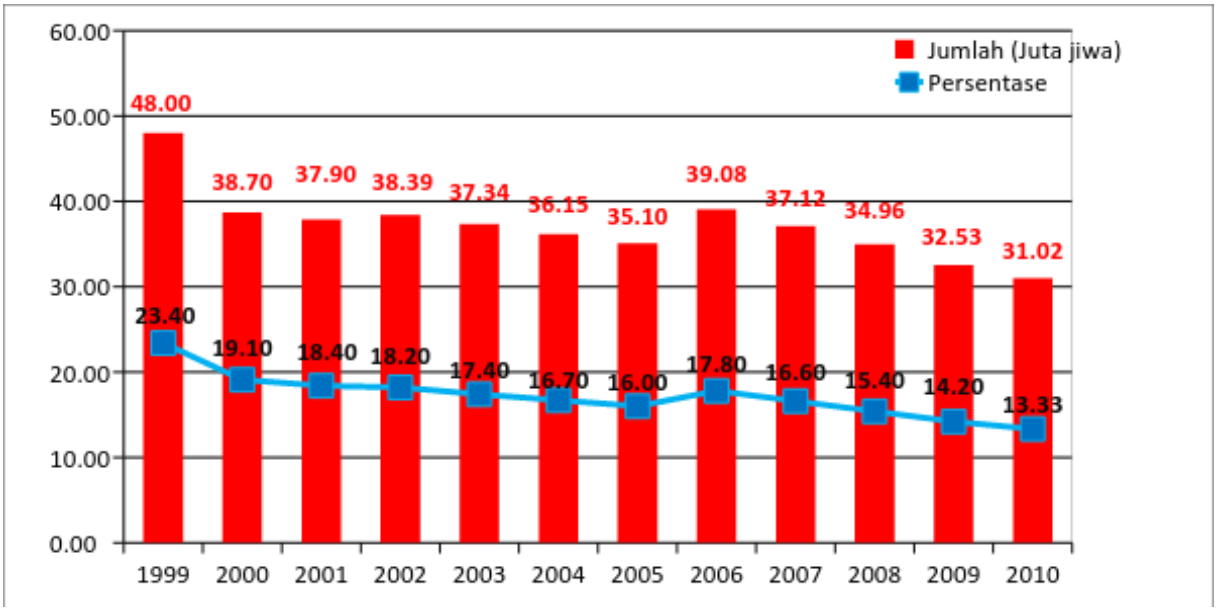
Tetapi sekarang ini, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks di tingkat nasional maupun regional, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam menanggulanginya.

Menurut Tambunan (2003) , masalah besar dalam pembangunan yang di hadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumla h orang yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Pembangunan di

Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Bentuk kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah suatu bentuk yang masih semu. Apakah karena secara struktural Indonesia ini miskin atau mungkin secara kultural Indonesia ini miskin. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996 – 2007 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000–2005 (BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.42). Sekalipun sudah ada penurunan tetapi jumlahnya masih merupakan isu nasional, yaitu 13,56 juta orang penduduk miskin diperkotaan dan 23,61 juta orang penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2007. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 %) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta(BPS, 2009).

Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah negara, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 %) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama

periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta(BPS, 2009).



sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta

Gambar 1.1

Jumlah dan persentase kemiskinan di Indonesia tahun 1999-2010

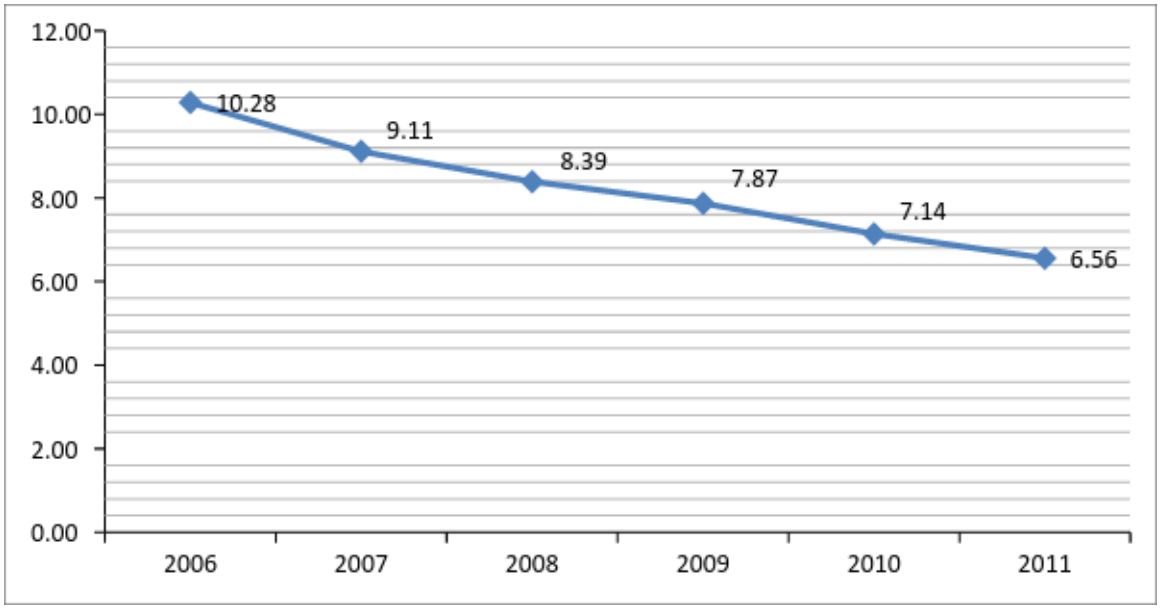
Data empiris dari berbagai negara sedang berkembang selama periode 1960-1980 menunjukkan semakin melemahnya mekanisme trickle-down effect. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak secara otomatis berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di suatu negara. Sementara pada tahun 1960-an, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pengurangan tingkat kemiskinan (Culter&Katz, 1991). Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu diringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IMP) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan
manusia. Sistem perhitungan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom bernama Amart ya Send dan dibantu oleh Mahbub Ul Haq, sehingga sering indeks ini disebut Indeks Sen. IPM mencakup 3 (tiga) komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living) (BPS, 2012).

Dalam program pembangunan pengentasan kemiskinan, selalu ada proses komunikasi pembangunan yang sering disebut dengan sosialisasi melalui berbagai saluran informasi. Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan yang manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran yang dikehendaki, apabila dalam setiap tahapannya: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, didasarkan pada informasi yang memadai (Dahlan, 1997 : 2). Dalam semua bagain dari kehidupan manusia, pasti tidak lepas dari yang namanya, informasi. Dari mulai hal terkecil seperti informasi umum sampai hal terbesar sekalipun seperti informasi khusus.

Bahkan bisa dibilang, informasi sangat memegang peranan penting dalam semua bagian dari kehidupan manusia. Pemerataan pembangunan hanya dimungkinkan apabila dilakukan seiring dengan pemerataan informasi dan komunikasi (Dahlan, 1997 : 5). Karena upaya pemerataan apapun tanpa disertai pemerataan informasi dan komunikasi, yang tercapai justru sebaliknya yaitu kesenjangan. Kesenjangan ini pada akhirnya berdampak pada kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa intervensi pembangunan sering kali tidak sampai kepada sasaran sebab informasi hanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh golongan yang bukan sasaran.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah yang terjadi saat ini sangatlah kompleks. Sebuah Negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai macam masalah yang pastinya berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah perekonomian sudah tidak lazim di Indonesia salah satu contohnya adalah masalah ekonomi yaitu inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah tersebut mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial dan itu sangat membutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak menghambat langkah Negara Indonesia untuk menjadi Negara yang lebih maju. Dalam ilmu ekonomi, inflasi (inflation) adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu) selama waktu tertentu. Dengan kata lain juga inflasi adalah suatu proses di mana menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi merupakan proses dari suatu perisitiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat suatu harga. Artinya, apabila tingkat harga tinggi itu belum pasti menunjukkan inflasi. Jika terjadi proses kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi berarti terjadi inflasi.

Pengangguran (unemployment) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.



sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta

Gambar 1.2

Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 2005-2011

Seperti yang kita ketahui, tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai masalah lainnya di Negara kita menjadi salah factor utama rendahnya taraf hidup penduduk di Negara kita. Menurut Boediono (2001:35) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indicator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi penurunan pengangguran. Suatu proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila

terjadi kenaikan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja dan kestabilan harga. Agar hal ini bisa tercapai, maka sangat diperlukan peran serta pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan agar tujuan atau sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Peran pemerintah di sini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, kebijkan moneter, maupun kebijakan-kebijakan lain yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian secara nasional. Ade (2007 : 2) mengatakan bahwa masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia sudah tergolong sebagai negara bermasalah dengan ketenagakerjaan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja sehingga berdampak pada tingginya jumlah pengangguran.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh dari sebuah inflasi terhadap tingkat kemiskinan?
3. Apa pengaruh yang dihasilkan dari huubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan?
4. Secara simultan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempersempit cakupan pembahasan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan pada tahun (2007-2011).

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisa tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan
2. Menganalisa inflasi terhadap tingkat kemiskinan
3. Menganalisa tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Telaah literatur

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan factor-faktor produksi, yaitu: modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan. Makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indicator lain seperti distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan melihat produk domestic regional bruto (PDRB) dan laju pertmbuhannya atas dasar harga konstan.

Kuznets (2002) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya. Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan yaitu terjadinya perbedaan laju pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya keenjangan kemakmuran dan kemajuan daerah.

2.1.2 Inflasi

Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang

melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui keinginannya dan menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang efektif terhadap barang. Dengan kata lain, masyarakat berhasil memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga golongan masyarakat ini bisa memperoleh barang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya.
Tentunya tidak semua golongan ini misalnya masyarakat yang berpenghasilan tetap atau penghasilannya meningkat tidak secepat laju inflasi. Bila jumlah permintaan barang meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka inflationary gap akan timbul. Keadaan ini menyebabkan harga-harga naik dan berarti rencana pembelian barang tidak dapat terpenuhi. Pada periode selanjutnya, masyarakat akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi (baik dari pencetakan uang baru maupun dari kredit pada bank dan permintaan kenaikan gaji). Proses inflasi akan tetap berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan masyarakat.

Teori Strukturalis

Teori ini juga teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab munculnya inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi terutama yang terjadi di negara berkembang. Ada dua kekakuan/ketidakelastisan dalam perekonomian di negara berkembang yang menimbulkan inflasi yaitu:

a. Kekakuan dari penerimaan impor
b. Kekakuan penawaran bahan makanan di negara berkembang

2.1.3 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (employed persons) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi.

Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong.

2.1.4 Kemiskinan

Menurut Mubyarto (2004) kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup minium yaitu sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
Menurut Lincoln Arsyad (2010) ukuran indicator kemiskinan antara lain:

a. Tingkat konsumsi beras per tahun
b. Tingkat pendapatan
c. Indicator kesejahteraan masyarakat

Menurut publikasi PBB tahun 1961 yang berjudul international definition and measurement of levels of living: an interim guide dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, yaitu; kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan social, sandang, rekreasi dan kebebasan.

Menurut Kuncoro (2004) factor-faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah tingkat dan laju pertumbuhan output, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan investasi.

2.2.1 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara, seperti derajat pendidikan

tenaga kerja dan struktur ekonomi. Hasil penelitian dari Ravallion dan Chen (1997) yang menggunakan data dari survei-survei pendapatan/pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) di 67 NSB dan Negara-negara transisi untuk periode 1981-1994 juga menunjukan bahwa penurunan kemiskinan hampir selalu berbarengan dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita atau standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah dengan kontraksi ekonomi. Hasil plot antara perubahan laju kemiskinan (dalam log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antarsurvei menunjukan suatu tren yang negatif. Sedangkan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan metode yang sama (analisis lintas Negara) menunjukan bahwa kemiskinan di suatu Negara akan semakin rendah jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Juga, studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Chairul Nizar (2013) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negative dan signifikan.

H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap kemiskinan

2.2.2 Hubungan inflasi terhadap kemiskinan

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia, jumlah uang yang beredar lebih besar dibanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup

diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflationary gap).

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi global paling mendesak saat ini,terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, jumlah orang miskin tidak banyak berkurang dalam tiga puluh tahun terakhir, dari sekitar 50 juta jiwa di tahun 1976 menjadi 40 jiwa di tahun 2006. Dalam kurun waktu yang panjang teresebut, jelas sekali bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi kemiskinan ini diperburuk dengan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, paling tidak sejak 2002, saat Indonesia mulai mencoba menggeliat keluar dari krisis. Akselerasi pembangunan pasca krisis dipandang belum menyentuh golongan bawah. Oleh karena itu tak pelak lagi bahwa kemiskinan, bersama dengan distribusi pendapatan, merupakan fokus perhatian semua pihak, utamanya akademisi dan pengambil kebijakan. Krisis moneter yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional.

Krisis moneter menyebabkan terjadinya imported inflation sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia. Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya

hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara. Dengan demikian, maka pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter saja, yang umumnya bersifat jangka pendek, tetapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor riil, yaitu dengan target utama mengeliminasi hambatan-hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional. Fitri Amalia (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa inflasi mempengaruhi kemiskinan secara negatif.

H2 : Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

2.2.3 Hubungan pengangguran terhadap kemiskinan

Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai pekerjaaan. permasalahan yang timbul ke permukaan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya. Sehingga fenomena ini memunculkan adanya pengangguran. Pengangguran, di satu sisi menunjukkan adanya selisih antara permintaan (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply of labor) dalam suatu perekonomian. Diluar itu terdapat juga sebab-sebab non ekonomis seperti pranata, sikap dan pola tingkah laku yang berhubungan dengan pengamanan hak kerja, serta keinginan si penganggur untuk menerima jenis pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi, aspirasi atau selera mereka. (Munir, 1985).

Seseorang yang menganggur akan mengalami depresi dalam dirinya , karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat dari keadaan keuangan yang tidak memungkinkan, selain itu keraguan dalam diri pun akan meningkat/tidak percaya diri

untuk melakukan hal yang baik dalam meraih pekerjaan. Seorang pengangguran cenderung melakukan hal yang negatif yaitu melakukan tindakan kriminalitas seperti mencuri, menjambret, menipu, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan nya untuk hidup. Artinya banyak nya jumlah pengangguran di suatu daerah atau negara , akan menimbulkan tingginya tingkat kriminalitas di suatu daerah atau negara tersebut. Selain itu juga, akan menimbulkan banyak nya aksi demo dan terror terhadap pemerintah, yang timbul dari rasa ketidakpuasan dan keputus asaan masyarakat.

Pemecahan masalah ini bisa di atasi dengan kepedulian pemerintah untuk mengutamakan penanganan tentang pengangguran yang lebih serius dan perencanaan suatu pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada propasar semata, tetapi juga harus mengutamakan pentingnya pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah, bukan hanya mengandalkan pada industri-industri atau perusahaan besar saja. Karena ini akan menimbulkan usaha ekonomi rakyat akan tergilas. Hal inilah yang akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran yang ada yang berdampak juga pada naiknya tingkat kemiskinan yang ada. Fitri Amalia (2012) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

H3 : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2.2 Kajian penelitian sejenis

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis mengambil contoh kajian penulisan ilmiah yang sejenis dan memiliki variabel yang hampir sama, sebagai bahan acuan serta pembelajaran dalam membuat penelitian ilmiah.

Berikut adalah beberapa penulisan ilmiah terdahulu yang penulis kaji dalam penelitian ilmiah ini:

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN TINGKAT KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1999 – 2009, oleh Nurfitri Yanti. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1999 –2009, (2) mengetahui pengaruh inflasi terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1999 – 2009, dan (3) mengetahui pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1999 – 2009.

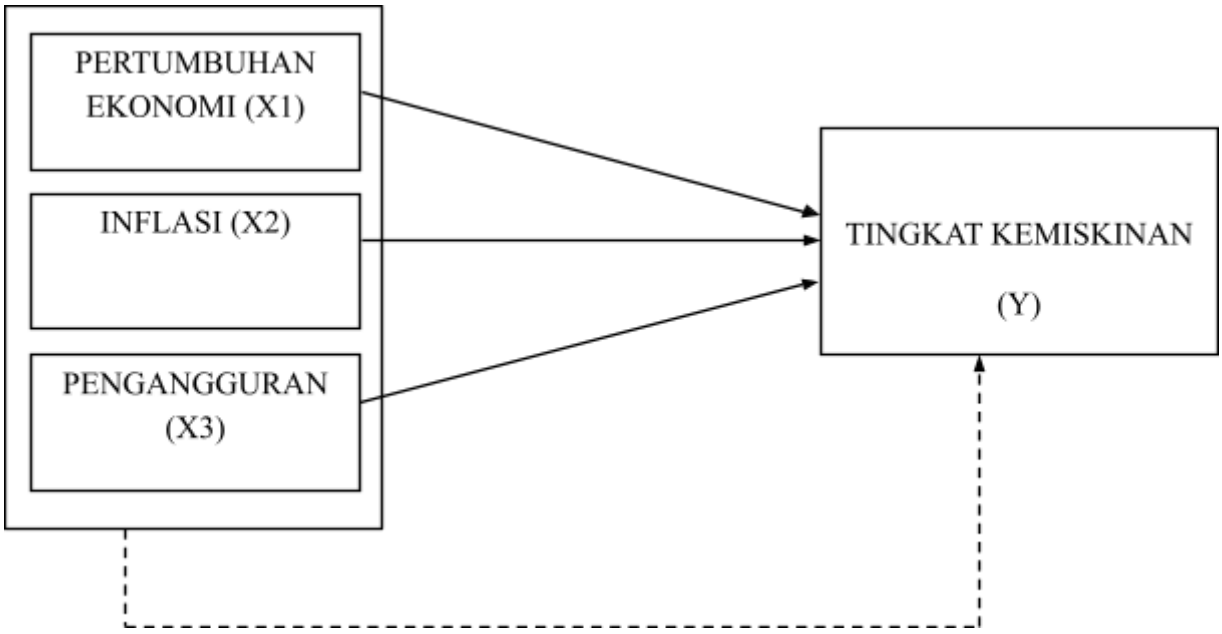
Diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi belum menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin, (2) Inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa laju inflasi belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan (3) Tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan. Hal ini berarti jika tingkat kesempatan kerja mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) PERIODE 2001-2010, oleh Fitri Amalia. Penelitian ini bertujuan untuk, mengethui pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia bagian Timur periode 2001-2010.

Diperoleh kesimpulan bahwa: Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur. Inflasi berpengaruh negative bagi tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karna inflasi sebagai determinan makro bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu negara. Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia. Pendidikan merupakan investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan penjelasan diatas , dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Pemikiran diatas dimaksudkan untuk menguji dan menganalisa Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Populasi dan sampel penelitian

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (1997 : 57). Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah negara Republik Indonesia

3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013). Sedangkan untuk pengambilan jumlah sample dengan menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten yang ada di negara Republik Indonesia yaitu semua propinsi yang ada di Indonesia.

3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional variable

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Variabel Dependen

   Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan di Indonesia tahun 2006-2012 (Y)
2. Variabel Independen

   Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:

   a. Pertumbuhan Ekonomi (X1)
   b. Inflasi (X2)
   c. Pengangguran (X3)

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel digunakan untuk memudahkan dalam memahami variabel-variabel yang digunakan. Adapun definisi operasional

variabel dalam penelitian ini sebagai berikut : Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi (X1).

   Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indicator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara financial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa perrtumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan dengan semestinya. Menurut Mudrajat Kuncoro (2003) salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan yaitu terjadinya perbedaan laju pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan daerah. Tanpa pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi tidak akan berhasil dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus disertai dengan pemerataan pembangunan.

2. Inflasi (X2).

   Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya. Dan tingkat inflasi berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dimana tingkat inflasi itu dibagi tiga, tingkat inflasi rendah yaitu mencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi moderat mencapai diantara 4 sampai 10 persen sedangkan tingkat inflasi yang serius dapat mencapai beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun (Sadono Sukirno, 2014;14).

3. Pengangguran (X3).

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong.

4. Tingkat kemiskinan (Y)

   Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya.

   Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian, yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis

kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Laju Pertumbuhan PDRB dan PDRB per Kapita Atas dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi 2006-2012. Data diambil dari BPS
Inflasi (X2)	Laju Inflasi di Indonesia menurut provinsi 2006-2012. Data diambil dari BPS.

Pengangguran (X3)	Indikator Ketenagakerjaan menurut Provinsi 2006-2012 . Data diambil dari BPS.
Kemiskinan (Y1)	Jumlah dan Persentase penduduk miskin menurut Provinsi 2006-2012. Data dari BPS

3.3 Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan didapat dari *library reasearch*, yaitu dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa buku. Kemudian juga dengan *internet reasearch*, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengutip ilmu ataupun teori yang tersebar luas di internet. Dapat pula berupa berita. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah merupakan data sekunder (*field Research*). Diperoleh dari pihak lain atau penelitian sebelumnya, juga diperoleh melalui beberapa situs resmi yang mengadakan kumpulan data yang dibutuhkan. Antara lain www.bps.go.id dan www.jakarta.bps.go.id dan juga www.simreg.bappenas.go.id.

3.4 Teknik analisis data

3.4.1 Uji asumsi klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias sebagai hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan

kesimpulan, maka digunakan uji asumsi klasik (Ghozali,2005:90 dalam Alkhairani,2012). Terdapat tiga asumsi klasik :

1. Uji Multikolinearitas

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilainya korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali,2005:91 dalam Alkhairani,2012).

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari :

a. Nilai *Tolerance* harus lebih besar dari 0,1, atau;
b. Nilai *Variance Infaltion Factor* (VIF) lebih kecil dari 10

Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai *VIF* lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan model regresi tersebut terbebas dari masalah Multikolinieritas.

2. Uji Autokeralasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model

regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW).Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbit Watson (DW)* dengan ketentuan:

a. Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
b. Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
c. Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negtif.

3. Uji Heterokedastisitas

Diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel independen yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian dilakukan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik. Jika membentuk pola tertentu yang teratur maka regresi terdapat heterokedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas (Prastisto,2004:155 dalam Alkhairani,2012).

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Gelejser. Dasar pengambilan keputusan :

a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk mengetahi apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan mengamati Scater Plot. Apabila titik-titik berada di garis normal atau mendekati garis normal maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

3.4.2 Persamaan multiregresi

Persamaan multiregresi digunakan untuk menganalisis hubungan variabel independen dengan variabel dependennya. Metode analisis data ini menggunakan progam SPSS versi 22. Regresi berganda untuk penelitian ini adalah dihubungkan dengan rumus :

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \beta 5X5$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan

Xi = Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran

α = konstanta

βi = koefisien

3.5 Uji hipotesis dan good fitnas model

3.5.1 Uji parsial (Uji t)

Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan koefisien regresi (b_i) yang paling besar,

selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial melalui uji t. Adapun rumusan hipotesis dengan menggunakan Uji t adalah sebagai berikut :

H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$

H_1 : $b_1 \neq 0$

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan t_{hitung} (t_h) dengan t_{tabel} (t_1) pada α 0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

1) $t_h \geq t_t$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

   Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel terikat) dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang diuji.

2) $t_h < t_t$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

   Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel terikat) dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji.

   Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh secara keseluruhan dihitung koefisien determinasi multiplenya (R^2). Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati 1 (satu), maka semakin kuat model tersebut dapat menerangkan variabel tergantungnya. Kemudian dilakukan pengujian variansnya dengan uji f.

Hipotesis diterima apabila titik lebih besar dari t_{tabel} ($f_h > f_t$) atau diperoleh harga $p < 0,05$.

Untuk membuktikan hipotesis kedua, masing-masing koefisien regresinya diuji dengan uji t. Hasil uji t bermakna apabila diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_h > t_t$) atau diperoleh harga $p < 0,05$. Untuk pengaruh yang dominan ditentukan oleh harga p yang terkecil atau R^2 parsial yang terbesar.

Untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sig.t < 0,05 Terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel Kemiskinan.

H2 : Sig.t < 0,05 Terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara variabel Inflasi terhadap variabel Kemiskinan.

H3 : Sig. t < 0,05 Terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara variabel Pengangguran terhadap variabel Kemiskinan.

3.5.2 Uji simultan (Uji F)

Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan uji F yaitu untuk menguji keberartian regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut :

H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$

H_1 : b_1 = minimal satu koefisien ≠ 0

Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan F_{hitung} (F_h) dengan F_{tabel} (F_t) pada α = 0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan :

1) $F_h \geq F_t$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

   Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat).

2) $F_h < F_t$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

   Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat).

   Untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

   Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan ekonomi (X1), Inflasi (X2), Pengangguran (X3) secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y).

   Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan ekonomi (X1), Inflasi (X2), Pengangguran (X3) secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y).

3.5.3 Interprestasi koefisien determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama variabel terikat atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat.

Tabel 3.2
Interpretasi Koefisiensi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah

0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Inflasi (X2) dan Pengangguran (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) dengan menggunakan Statistik Parametrik dan bantuan program SPSS.22. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

4.1.1 Deskripsi Statistik

Deskiripsi statistik adalah untuk menggambarkan isi sebuah data secara lengkap, seperti berapa rata-ratanya, standar deviasinya, dan sebagainya.

Tabel 4.1
Tabel Deskripsi Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERTUMBUHAN EKONOMI	165	1.39	28.46	6.4713	3.20942
INFLASI	165	0.00	19.56	6.5794	3.57837
PENGANGGURAN	165	2.32	15.75	7.1054	2.87690
TINGKAT KEMISKINAN	165	3.48	40.78	15.2716	8.23235
Valid N (listwise)	165				

Hasil Deskripsi Statistik

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh hasil deskripsi statistic sebagai berikut :

1) Kemiskinan sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sebesar 15.2716 dengan std. deviation sebesar 8.23235 . Tingkat kemiskinan maksimum sebesar 40.78 dan tingkat kemiskinan minimum sebesar 3.48.
2) Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen memiliki rata-rata sebesar 6.4713 dan std. deviation sebesar 3.20942. Tingkat Pertumbuhan ekonomi maximum sebesar 28.46, dan Tingkat Pertumbuhan ekonomi minimum sebesar 1.39.
3) Inflasi sebagai variabel independen memiliki rata-rata sebesar 6.5794 dan std. deviation sebesar 3.57837. Tingkat inflasi maximum sebesar 19.56 dan tingkat inflasi minimum sebesar 0.00.
4) Pengangguran sebagai variabel independen memiliki rata-rata sebesar 7.1054 dan std. deviation sebesar 2.87690. Tingkat pengangguran maximum sebesar 15.75 dan tingkat pengangguran minimum sebesar 2.32.

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi korelasi maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari :

a. Nilai *Tolerance* harus lebih besar dari 0,1, atau;
b. Nilai *Variance Infaltion Factor* (VIF) lebih kecil dari 10.

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Colinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
Pertumbuhan ekonomi		0.977	1.024
Inflasi		0.988	1.012
Pengangguran		0.988	1.012

a. Dependent variable : kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan tabel 4.2.1 diperoleh nilai *Tolerance* variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar 0.977, Inflasi sebesar 0.988, dan pengangguran sebesar 0.988, Nilai *Tolerance* ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,1. Begitupun dengan nilai *VIF* variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar 1.024, Inflasi sebesar 1.012, dan pengangguran sebesar 1.012. Nilai *VIF* ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi tersebut.

2) Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson (DW)* dengan ketentuan :

a. Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
b. Angka DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
c. Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negtif.

Tabel 4.3

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	Durbin-Watson
1	1.328

a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent variable: Kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan tabel 4.3.1 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.328. Angka D-W di antara-2 sampai +2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi tersebut.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

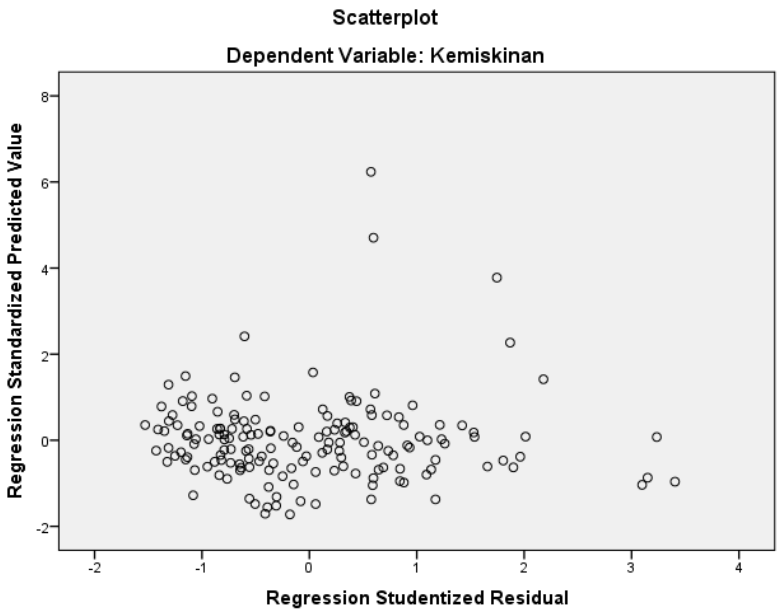
Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Scatter Plot* untuk menentukan ada atau tidaknya masalah dalam heteroskedastisitas. Jika pola jelas dan titik menyebar dengan di atas dan di bawah angka nol

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dari hasil pengolahan SPSS 22 pada *Output Diagram Scatter Plot* adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Diagram Scatter Plot



a. Dependent Variable : kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan gambar 4.1 diperoleh grafik Scatter Plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tiak terjadi

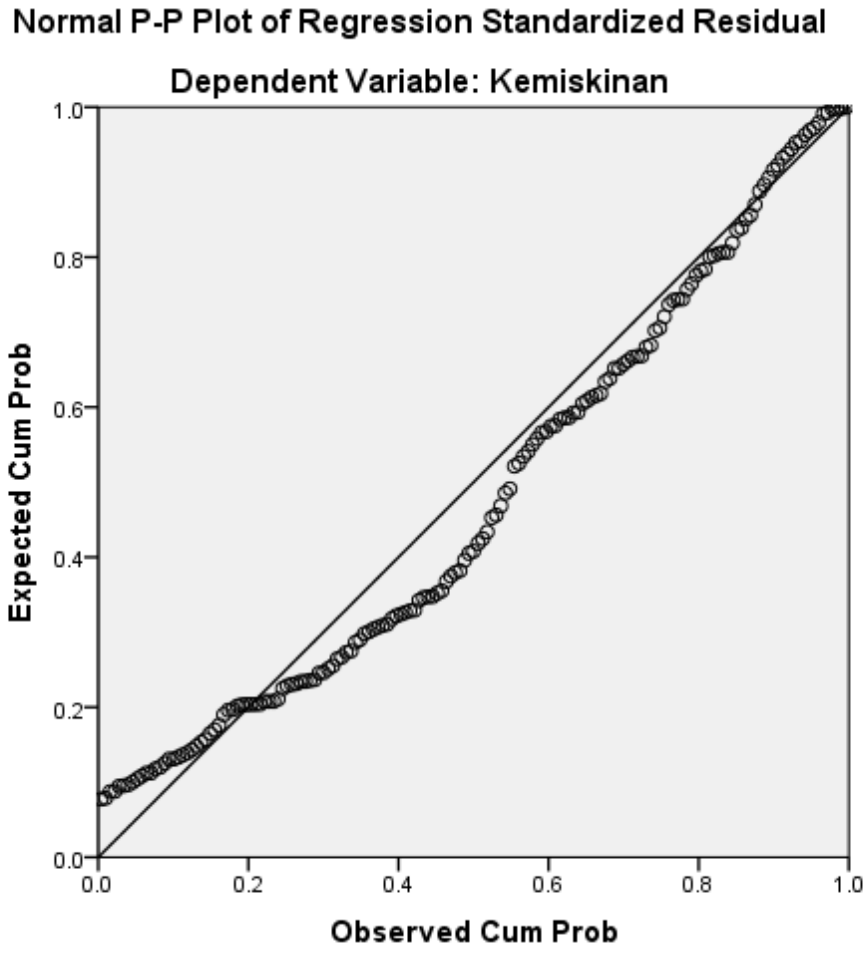
gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk penelitian.

4) Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengatahui apakah data yang digunakan terdisitribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusi normal.

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik berada atau mendekati garis normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

4.1.3. Interpretasi Persamaan Multiregresi

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel independen terhdap kemiskinan sebagai variabel dependen.

Tabel 4.4

Hasil Persamaan Multiregresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9.179	2.509	
	Pertumbuhan Ekonomi	.697	.195	.272
	Inflasi	.376	.173	.164
	Pengangguran	-.126	.216	-.044

a. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan table *Coefficients* diatas diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 9.179 menyatakan bahwa jika variable independen (X) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran, dianggap konstan maka variabel dependen (Y) yaitu kemiskinan akan naik sebesar 9.179.
2. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X1) bertanda positif 0.697. Hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Pertumbuhan Ekonomi, maka kemiskinan akan mengalami Kenaikan sebesar 0.697.

3. Koefisien regresi Inflasi (X2) bertanda positif 0.376. Hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pada Inflasi maka kemiskinan akan mengalami Kenaikan sebesar 0.376.
4. Koefisien regresi Pengangguran (X3) bertanda negatif 0.126. Hal ini meyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pada pengangguran, maka kemiskinan akan mengalamai penurunan sebesar 0.126.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis dan *Goodness of Fit Test*

1) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t di lakukan untuk mengetahui apakah secara Parsial variabel Independen (X) yaitu PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kemiskinan.

Tabel 4.5

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		T	Sig.
1	(constant)	3,659	0,000
Pertumbuhan Ekonomi		3,852	.000
Inflasi		2,168	.032
Pengangguran		-.582	.562

a. Dependent variable : Kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Dasar pengambilan keputusan uji parsial (uji t) sebagai berikut :

- Sig. t > α 0,05 ; Ho Diterima
- Sif. t < α 0,05 ; Ho Ditolak

1. Uji Parsial Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) Terhadap Kemiskinan (Y)

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhdap kemiskinan (Y).

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap kemiskinan (Y).

Berdasarkan table *Coefficients* diatas diperoleh nilai signifikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.000 < 0,05 Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhadap kemiskinan (Y).

2. Uji Parsial Variabel Inflasi (X_2) Terhadap Kemiskinan (Y)

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel inflasi (X_2) terhadap kemiskinan (Y).

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel inflasi (X_2) terhadap kemiskinan (Y).

Berdasarkan table *Coefficients* diatas diperoleh nilai signifikan Inflasi sebesar 0.032 < 0.05 Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel inflasi (X_2) terhadap kemiskinan (Y).

3. Uji Parsial Variabel Pengangguran (X_3) Terhadap Kemiskinan (Y)

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengangguran (X_3) terhadap kemiskinan (Y).

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengangguran (X_3) terhadap kemiskinan (Y).

Berdasarkan table *Coefficients* diatas diperoleh nilai signifikan pengangguran sebesar 0.562 > 0.05 Ho diterima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengangguran (X_3) terhadap kemiskinan (Y).

2) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukann untuk mengetahui apakah secara simultan Variabel Independen (X) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, dan pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen (Y) yaitu kemiskinan.

Tabel 4.6

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Df	F	Sig.
1	Regression	3	5.644	.001[b]
	Residual	161		
	Total	164		

a. Dependent Variable: Kemiskinan
b. Predictors: (Constant), Angka Kelahiran, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PMDN, Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Dasar pengambilan keputusan Uji Simultan (Uji F) yaitu :

- Sig. F > 0,05 ; Ho diterima

  Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Variabel Independen (X) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, dan pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen (Y) yaitu kemiskinan.

- Sig. F < 0,05 ; Ho ditolak

  Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel Variabel Independen (X) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, dan pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen (Y) yaitu kemiskinan

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh hasil signifikan sebesar 0.001 < 0,05 Ho diterima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Variabel Independen (X) yaitu Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, dan pengangguran, terhadap Variabel Dependen (Y1) yaitu kemiskinan.

3) Interpretasi Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen yaitu Pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Pengangguran dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kemiskinan.

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.308[a]	.095	.078	7.90347	1.328

a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Berdasarkan table 4.8 diatas diperoleh nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,078 atau sebesar 7,8%. Nilai ini menunjukan bahwa kemampuan Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, dan pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen (Y1) yaitu kemiskinan sebesar 7,8%. Sisanya sebesar 93,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas diperoleh nilai Sig.t Pertumbuhan ekonomi sebesar positif 3.582 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0,05 Ho Ditolak. Artinya bahwa ketika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka akan meningkatkan kemiskinan dan berpengaruh secara signifikan. Hal

ini tidak sejalan dengan penelitian dewi kurniawati, Anderson kumenang dan debby rotinsulu (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan. Yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah. Namun dalam penelitian Chairul Nizar, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur (2013) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pengurangan angka kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 1 unit maka angka kemiskinan akan turun sekitar 0,00000502 % dengan asumsi bahwa faktor lain tetap. Maka terlihat bahwa pengaruhnya sangat kecil.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas diperoleh nilai Sig. t Inflasi sebesar positif 2.168 dengan tingkat signifikan 0,032 < 0,05 Ho ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel inflasi (X_2) terhadap kemiskinan (Y). bahwa ketikan inflasi meningkat maka akan meningkatkan kemiskinan dan berpengaruh secara signifikan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dibuat oleh Imelia (2012) menyatakan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan baik terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, maupun terhadap tingkat kemiskinan, dan juga diperkuat dengan hasil peneliatian yang dikeluarkan oleh Fitri Amalia (2012) menyatakan bahwa laju inflasi mempengaruhi kemiskinan secara negative.

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas diperoleh nilai Sig.t Pengangguran sebesar negatif 0,582 dengan tingkat signifikansi 0.562 > 0,05 Ho diterima. Artinya bahwa ketika pengangguran mengalami kenaikan maka akan menurunkan kemiskinan tetapi hal ini tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yacoub (2012) hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh tingkat pengangguran meningkat berpotensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya apabila tingkat pengangguran menurun maka tingkta kemiskinan berpotensi untuk naik, dan pengaruh tersebut signifikan. Dan dikuatkan juga oleh Fitri Amalia (2012) menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Model regresi memenuhi asumsi klasik yaitu terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran.

Laju pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Artinya bahwa peningkatan laju pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi akan berdampak pada menaikkan tingkat kemiskinan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi oleh penurunan ankga kemiskinan ini terjadi akibat tidak dibarenginya pemerataan pendapatan di banyak provinsi di Indonesia, akibatnya berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang seharusnya angka kemiskinan tersebut menurun pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Inflasi berpengaruh Positif dan signifkan. Artinya bahwa jika terjadi inflasi maka akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu negara.

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Artinya bahwa ketika tingkat pengangguran meningkat maka kemiskinan di Indonesia akan menurun. Tidak berpengaruhnya pengagguran salah

satunya terjadi karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih mengganggur.

Secara simultan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran, berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti adalah:

1. Pemerataan pendapatan harus dilakukan secara bersama-sama, karna dengan pendapatan yang sama rata, tidak ada jarak yang sangat tinggi diantara pendapatan seseorang dengan pendapatan orang lain, maka angka kemiskinan di Indonesia akan menurun seiring dengan pemerataan pendapatan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat.
2. Pemerintah harus mengawasi dan menekan laju inflasi dengan cara kebijakan moneter atau bisa dengan kebijakan fiscal. Salah satu contohnya adalah menurunkan pungutan pajak secara dinamis, menaikkan insentif bagi dunia usaha yang melakukan perdagangan internasional, kebijakan ekspor-impor yang secara positif dapat menurunkan tingkat inflasi, kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak menekan dunia usaha, dan lain-lain. Dampak positifnya, dapat meningkatkan gairah sektor-sektor industri yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja meningkat; bukan justru memperbanyak PHK dan pengangguran.
3. Kesadaran dari masyarakat yang masih menganggur harus segera ditingkatkan, karna dengan hanya mengharapkan pemberian dari keluarga yang tidak menganggur dan memiliki penghasilan yang

tinggi tidak akan meingkatkan kesejahteraan bagi individu yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Disini pemerintah juga harus memperhatikan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak sehingga bisa menekan angka pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Fitri. 2012. *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2012*. EconoSains Vol. X, No.2.

Hendrati, I.M., Aprilianti, Hera. 2009. *Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada saat krisis di kota Surabaya*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol.9, No. 1

Immelia. 2012. *Pengaruh Inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma ekonomika Vol.1, No.5.

Kurniawati. S, Dewi. 2014. *Analisis Pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara* . Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi Vol.14, No.2.

Putri, I.A.S.M., Yuliarmi, N. 2014. *Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Bali*. E- Jurnal EP Unud Vol.2, No.10.

Silvia, E.D., Wardi, Yunia., Aimon, Hasdi. 2013. *Analisis Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan Inflasi di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi Vol.1, No.02.

Sopianti, Komang., Ayuningsasi, ketut. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, tingkat Inflasi, dan upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Bali*. E-Jurnal EP Unud Vol. 2, No.4.

Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS Vol.8, No.3.

www.bps.go.id

www.simreg.bappenas.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

DATA PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, PENGANGGURAN DAN TINGKAT KEMISKINAN

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta

Pertumbuhan Ekonomi

Daerah	2007	2008
Aceh	2.36	5.23
Sumatra Utara	6.90	6.39
Sumatra Barat	6.34	6.87
Riau	3.40	5.65
Jambi	6.82	7.16
Sumatra Selatan	5.83	5.07
Bengkulu	6.45	5.74
Lampung	5.94	5.34
Kep. Bangka Belitung	4.53	4.60
Kepulauan Riau	7.00	6.62
DKI Jakarta	6.43	6.23
Jawa Barat	6.47	6.20
Jawa Tengah	5.59	5.60
D.I Yogyakarta	4.30	5.03
Jawa Timur	6.10	5.94
Banten	6.04	5.77

Bali	5.91	5.97
Nusa Tenggara Barat	4.90	2.82
Nusa Tenggara Timur	5.14	4.83
Kalimantan Barat	6.02	5.45
Kalimantan Tengah	6.06	6.16
Kalimantan Selatan	6.01	6.44
Kalimantan Timur	1.83	4.89
Sulawesi Utara	6.46	10.85
Sulawesi Tengah	7.98	7.78
Sulawesi Selatan	6.34	7.78
Sulawesi Tenggara	7.96	7.27
Gorontalo	7.50	7.75
Sulawesi Barat	7.42	12.07
Maluku	5.62	4.23
Maluku Utara	6.00	5.99
Papua Barat	6.94	7.83
Papua	4.33	1.39
Daerah	2009	2010
Aceh	5.51	2.74
Sumatra Utara	5.07	6.41
Sumatra Barat	4.28	5.93
Riau	2.96	4.21
Jambi	6.38	7.35
Sumatra Selatan	4.11	5.63
Bengkulu	5.61	6.10
Lampung	5.26	5.88
Kep. Bangka Belitung	3.73	5.98
Kepulauan Riau	3.52	7.19
DKI Jakarta	5.01	6.50
Jawa Barat	4.18	6.20
Jawa Tengah	5.14	5.84
D.I Yogyakarta	4.43	4.88
Jawa Timur	5.01	6.67
Banten	4.70	6.10
Bali	5.32	5.83
Nusa Tenggara Barat	12.13	6.34

Nusa Tenggara Timur	4.29	5.25
Kalimantan Barat	4.80	5.46
Kalimantan Tengah	5.56	6.50
Kalimantan Selatan	5.28	5.58
Kalimantan Timur	2.28	5.10
Sulawesi Utara	7.84	7.15
Sulawesi Tengah	7.71	8.74
Sulawesi Selatan	6.23	8.18
Sulawesi Tenggara	7.57	8.22
Gorontalo	7.54	7.62
Sulawesi Barat	6.02	11.89
Maluku	5.43	6.46
Maluku Utara	6.07	7.95
Papua Barat	13.86	28.46
Papua	22.21	3.19

Daerah	**2011**
Aceh	4.83
Sumatra Utara	6.62
Sumatra Barat	6.25
Riau	5.04
Jambi	8.53
Sumatra Selatan	6.49
Bengkulu	6.46
Lampung	6.43
Kep. Bangka Belitung	6.50
Kepulauan Riau	6.65
DKI Jakarta	6.72
Jawa Barat	6.50
Jawa Tengah	6.03
D.I Yogyakarta	5.16
Jawa Timur	7.21
Banten	6.37

Bali	6.49
Nusa Tenggara Barat	2.68
Nusa Tenggara Timur	5.62
Kalimantan Barat	5.97
Kalimantan Tengah	6.76
Kalimantan Selatan	6.11
Kalimantan Timur	4.08
Sulawesi Utara	7.39
Sulawesi Tengah	9.11
Sulawesi Selatan	7.60
Sulawesi Tenggara	8.96
Gorontalo	7.67
Sulawesi Barat	10.31
Maluku	6.06
Maluku Utara	6.40
Papua Barat	27.01
Papua	5.32

Inflasi

Daerah	2007	2008
Aceh	11.00	10.27
Sumatra Utara	6.42	10.63
Sumatra Barat	8.90	12.68
Riau	7.53	9.02
Jambi	7.42	11.57
Sumatra Selatan	8.21	11.15
Bengkulu	5.00	13.44
Lampung	6.58	14.82
Kep. Bangka Belitung	2.64	18.40
Kepulauan Riau	4.84	8.39
DKI Jakarta	6.04	11.11
Jawa Barat	5.25	10.23
Jawa Tengah	6.75	10.34

D.I Yogyakarta	7.99	9.88
Jawa Timur	6.27	8.73
Banten	0.00	10.75
Bali	5.91	9.25
Nusa Tenggara Barat	8.76	13.01
Nusa Tenggara Timur	8.44	10.90
Kalimantan Barat	8.56	11.19
Kalimantan Tengah	7.57	11.65
Kalimantan Selatan	7.78	11.62
Kalimantan Timur	7.27	12.69
Sulawesi Utara	10.13	9.71
Sulawesi Tengah	8.13	10.40
Sulawesi Selatan	5.71	11.79
Sulawesi Tenggara	7.53	15.28
Gorontalo	7.02	9.20
Sulawesi Barat	0.00	11.66
Maluku	10.43	9.34
Maluku Utara	5.85	11.25
Papua Barat	0.00	19.56
Papua	10.35	12.55
Daerah	2009	2010
Aceh	3.50	4.64
Sumatra Utara	2.69	7.65
Sumatra Barat	2.05	7.84
Riau	1.94	7.00
Jambi	2.49	10.52
Sumatra Selatan	1.85	6.02
Bengkulu	2.88	9.08
Lampung	4.18	9.95
Kep. Bangka Belitung	2.17	9.36
Kepulauan Riau	1.88	7.40
DKI Jakarta	2.34	6.21
Jawa Barat	2.11	4.53
Jawa Tengah	3.19	7.11
D.I Yogyakarta	2.93	7.38
Jawa Timur	3.39	7.33

Banten	2.49	6.08
Bali	4.37	8.10
Nusa Tenggara Barat	3.14	11.07
Nusa Tenggara Timur	6.49	9.97
Kalimantan Barat	4.91	8.52
Kalimantan Tengah	1.39	9.49
Kalimantan Selatan	3.86	9.06
Kalimantan Timur	4.06	7.00
Sulawesi Utara	2.31	6.28
Sulawesi Tengah	5.73	6.40
Sulawesi Selatan	3.24	6.82
Sulawesi Tenggara	4.60	3.87
Gorontalo	4.35	7.43
Sulawesi Barat	1.78	5.12
Maluku	6.48	8.78
Maluku Utara	3.88	5.32
Papua Barat	2.61	8.13
Papua	1.92	4.48

Daerah	**2011**
aceh	3.32
Sumatra Utara	3.54
Sumatra Barat	5.37
Riau	5.09
Jambi	2.76
Sumatra Selatan	3.78
Bengkulu	3.96
Lampung	4.34
Kep. Bangka Belitung	5.00
Kepulauan Riau	3.76
DKI Jakarta	3.97
Jawa Barat	2.75
Jawa Tengah	2.87

D.I Yogyakarta	3.88
Jawa Timur	4.72
Banten	3.78
Bali	3.75
Nusa Tenggara Barat	6.38
Nusa Tenggara Timur	4.32
Kalimantan Barat	4.91
Kalimantan Tengah	5.28
Kalimantan Selatan	3.98
Kalimantan Timur	6.45
Sulawesi Utara	0.67
Sulawesi Tengah	4.47
Sulawesi Selatan	2.87
Sulawesi Tenggara	5.09
Gorontalo	4.08
Sulawesi Barat	4.91
Maluku	2.85
Maluku Utara	4.52
Papua Barat	0.90
Papua	3.40

Pengangguran

Daerah	2007	2008
aceh	2.29	2.26
Sumatra Utara	2.31	2.21
Sumatra Barat	2.33	2.08
Riau	2.28	2.10
Jambi	1.83	1.64
Sumatra Selatan	2.23	2.09
Bengkulu	1.54	1.59
Lampung	2.03	1.97

Kep. Bangka Belitung	1.87	1.79
Kepulauan Riau	2.20	2.08
DKI Jakarta	2.53	2.50
Jawa Barat	2.57	2.49
Jawa Tengah	2.04	1.99
D.I Yogyakarta	1.81	1.68
Jawa Timur	1.92	1.86
Banten	2.76	2.72
Bali	1.33	1.20
Nusa Tenggara Barat	1.87	1.81
Nusa Tenggara Timur	1.31	1.32
Kalimantan Barat	1.87	1.70
Kalimantan Tengah	1.63	1.52
Kalimantan Selatan	2.03	1.82
Kalimantan Timur	2.49	2.41
Sulawesi Utara	2.51	2.37
Sulawesi Tengah	2.13	1.70
Sulawesi Selatan	2.42	2.20
Sulawesi Tenggara	1.86	1.75
Gorontalo	1.97	1.73
Sulawesi Barat	1.70	1.52
Maluku	2.50	2.37
Maluku Utara	1.80	1.87
Papua Barat	2.25	2.03
Papua	1.61	2.67

Daerah	2009	2010
aceh	2.16	2.12
Su	2.13	2.01

Sumatra Utara		
Sumatra Barat	2.08	1.94
Riau	2.15	2.17
Jambi	1.71	1.68
Sumatra Sel	2.03	1.89

atan		
Bengkulu	1.63	1.52
Lampung	1.89	1.72
Kep. Bangka Belitung	1.81	1.73
Kepu	2.09	1.93

Lauan Riau		
DKI Jakarta	2.50	2.40
Jawa Barat	2.39	2.34
Jawa Tengah	1.99	1.83
D. I	1.79	1.74

Yogyakarta		
Jawa Timur	1.63	1.45
Banten	2.71	2.62
Bali	1.14	1.12
Nusa Tenggara	1.83	1.67

Barat		
NusaTenggaraTimur	1.38	1.21
KalimantanBarat	1.69	1.53
Kali	1.53	1.42

mantanTengah		
KalimantanSelatan	1.85	1.66
KalimantanTi	2.38	2.31

mur		
SulawesiUtara	2.36	2.26
SulawesiTengah	1.69	1.53
SulawesiSel	2.19	2.12

atan		
SulawesiTenggara	1.56	1.53
Gorontalo	1.77	1.64
SulawesiBar	1.51	1.18

at		
Maluku	2.36	2.30
MalukuUtara	1.90	1.80
PapuaBarat	2.02	2.04
Papua	1.41	1.27

Daerah	**2011**
aceh	2.01
Sumatra Utara	1.85

Sumatra Barat	1.86
Riau	1.67
Jambi	1.39
Sumatra Selatan	1.75
Bengkulu	0.86
Lampung	1.75
Kep. Bangka Belitung	1.28
Kepulauan Riau	2.05
DKI Jakarta	2.38
Jawa Barat	2.29
Jawa Tengah	1.78
D.I Yogyakarta	1.38
Jawa Timur	1.43
Banten	2.57
Bali	0.84
Nusa Tenggara Barat	1.67
Nusa Tenggara Timur	0.99
Kalimantan Barat	1.36
Kalimantan Tengah	0.94
Kalimantan Selatan	1.65
Kalimantan Timur	2.29
Sulawesi Utara	2.15
Sulawesi Tengah	1.39
Sulawesi Selatan	1.88
Sulawesi Tenggara	1.12
Gorontalo	1.45
Sulawesi Barat	1.04
Maluku	2.00
Maluku Utara	1.71
Papua Barat	2.19
Papua	1.37

Tingkat Kemiskinan

Daerah	2008	2009
aceh	3.28	3.16
Sumatra Utara	2.63	2.53
Sumatra Barat	2.48	2.37
Riau	2.42	2.36
Jambi	2.33	2.23
Sumatra Selatan	2.95	2.88
Bengkulu	3.10	3.03
Lampung	3.10	3.04
Kep. Bangka Belitung	2.26	2.15
Kepulauan Riau	2.33	2.22
DKI Jakarta	1.53	1.46
Jawa Barat	2.61	2.57
Jawa Tengah	3.02	2.96
D.I Yogyakarta	2.94	2.91
Jawa Timur	2.99	2.92
Banten	2.20	2.10
Bali	1.89	1.82
Nusa Tenggara Barat	3.22	3.17
Nusa Tenggara Timur	3.31	3.24
Kalimantan Barat	2.56	2.40
Kalimantan Tengah	2.24	2.16
Kalimantan Selatan	1.95	1.87
Kalimantan Timur	2.40	2.25
Sulawesi Utara	2.44	2.31
Sulawesi Tengah	3.11	3.03
Sulawesi Selatan	2.65	2.59
Sulawesi Tenggara	3.06	2.97
Gorontalo	3.31	3.21
Sulawesi Barat	2.95	2.82
Maluku	3.44	3.39
Maluku Utara	2.48	2.42

Papua Barat		3.67	3.56
Papua		3.71	3.61
Daerah	2009		2010
aceh	3.08		3.04
SumatraUtara	2.44		2.43
SumatraBarat	2.26		2.25
Riau	2.25		2.16

Jambi	2.17	2.12
Sumatra Selatan	2.79	2.74
Bengkulu	2.92	2.91
Lampung	3.01	2.94
Kep. Ban	2.01	1.87

gkaBelitung		
KepulauanRiau	2.11	2.09
DKIJakarta	1.29	1.25
JawaBar	2.48	2.42

at		
Jawa Tengah	2.87	2.81
D. I Yogyakarta	2.85	2.82
Jawa Timur	2.81	2.73
Banten	2.03	1.97

Bali	1.64	1.59
NusaTenggaraBarat	3.13	3.07
NusaTenggaraTimur	3.15	3.14
Kal	2.23	2.20

imantanBarat		
KalimantanTengah	1.95	1.91
KalimantanSel	1.63	1.65

atan		
KalimantanTimur	2.05	2.04
SulawesiUtara	2.28	2.21
SulawesiT	2.94	2.89

engah		
SulawesiSelatan	2.51	2.45
SulawesiTenggara	2.94	2.84
Goron	3.22	3.14

Gorontalo		
Sulawesi Barat	2.73	2.61
Maluku	3.34	3.32
Maluku Utara	2.34	2.24
Papua Barat	3.58	3.55

rat		
Papua	3.63	3.61

Daerah	2011
aceh	2.97
Sumatra Utara	2.38
Sumatra Barat	2.20
Riau	2.10
Jambi	1.92
Sumatra Selatan	2.07
Bengkulu	2.64
Lampung	1.64
Kep. Bangka Belitung	2.85
Kepulauan Riau	2.81
DKI Jakarta	1.29
Jawa Barat	2.36
Jawa Tengah	1.83
D.I Yogyakarta	2.79
Jawa Timur	2.78
Banten	2.63
Bali	1.52
Nusa Tenggara Barat	2.98
Nusa Tenggara Timur	3.02
Kalimantan Barat	2.14
Kalimantan Tengah	1.89
Kalimantan Selatan	1.68
Kalimantan Timur	1.89
Sulawesi Utara	2.14

Sulawesi Tengah	2.89
Sulawesi Selatan	2.78
Sulawesi Tenggara	2.33
Gorontalo	2.61
Sulawesi Barat	2.68
Maluku	3.11
Maluku Utara	2.30
Papua Barat	3.44
Papua	3.35

LAMPIRAN B

UJI ASUMSI KLASIK

Sumber:Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Stat	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	
1	(Constant)	9.179	2.509		3.659	.000		
	Pertumbuhan Ekonomi	.697	.195	.272	3.582	.000	.977	
	Inflasi	.376	.173	.164	2.168	.032	.988	
	Pengangguran	-.126	.216	-.044	-.582	.562	.988	

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Uji Multikolinearitas

Uji Autokorelasi

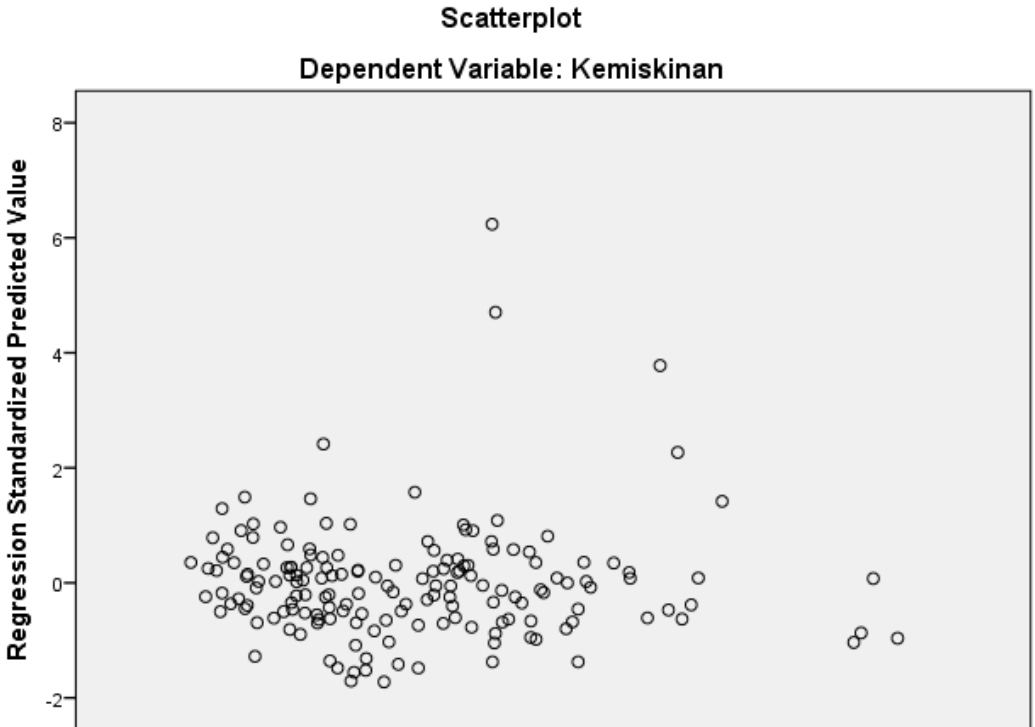
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.308[a]	.095	.078	7.90347	1.328

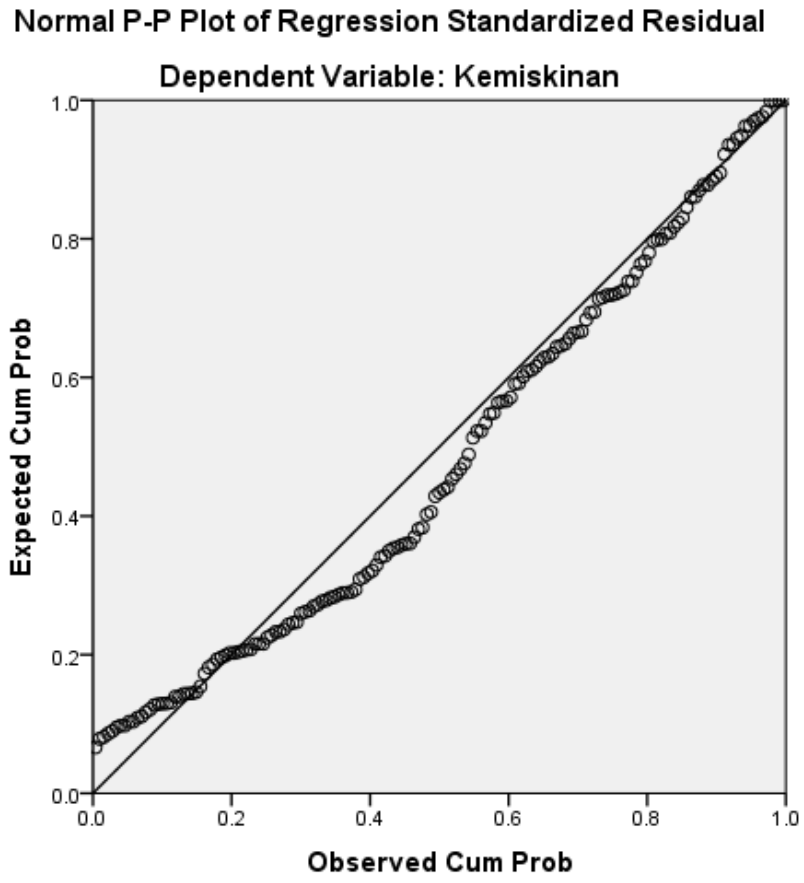
a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Uji Heteroskedastisitas



Uji Normalitas



LAMPIRAN C

PERSAMAAN MULTIREGRESI

Sumber:Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Persamaan Multiregresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.179	2.509		3.659	.000		
	Pertumbuhan Ekonomi	.697	.195	.272	3.582	.000	.977	1.024
	Inflasi	.376	.173	.164	2.168	.032	.988	1.012
	Pengangguran	-.126	.216	-.044	-.582	.562	.988	1.012

a. Dependent Variable: Kemiskinan

LAMPIRAN D

PENGUJIAN HIPOTESIS

Sumber:Hasil Pengolahan Data SPSS.22

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1057.700	3	352.567	5.644	.001[b]
	Residual	10056.840	161	62.465		
	Total	11114.540	164			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Stat	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	
1	(Constant)	9.179	2.509		3.659	.000		
	Pertumbuhan Ekonomi	.697	.195	.272	3.582	.000	.977	
	Inflasi	.376	.173	.164	2.168	.032	.988	
	Pengangguran	-.126	.216	-.044	-.582	.562	.988	

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.308[a]	.095	.078	7.90347	1.328

a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Kemiskinan